

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Hubungan internasional merupakan kerja sama antara Negara serta ada banyak interaksi Negara dalam masyarakat internasional yang berkaitan dengan segala bentuk interaksi, di antaranya masyarakat-masyarakat Negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh beberapa Negara. Adapun kerja sama internasional biasanya tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, serta ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi dan institusi atau lembaga non-state. Salah satu hubungan kerja sama yang baik serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat adalah dengan mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar. Berdasarkan data Direktoral Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia yang tersebar di 32 provinsi (sebelum pemekaran Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat). Namun, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui berapa pulau yang dimiliki Indonesia. Provinsi yang dimiliki pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau dengan jumlah 2.408 pulau. Lalu diikuti Papua Barat dengan 1.945 pulau di urutan kedua dan Maluku Utara dengan 1.474 pulau di posisi ketiga. Sementara provinsi yang paling sedikit memiliki pulau adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 19 pulau dan Jambi 19 pulau. Adapun

wilayah Indonesia mencapai 1,91 juta km persegi yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa (Rahma, 2020: 1).

Pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendorong devisa Indonesia. Salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya yang dimaksud adalah letak geografis antara lain luas wilayah serta keragaman sumber daya alam, budaya, kuliner dan kekayaan yang ada di tanah air. Sumber daya inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Terlebih saat ini, di Indonesia memiliki banyak destinasi eksotis dan memukau. Tidak hanya wisata alam yang beragam, wisata budaya serta sejarah di Indonesia juga tidak kalah menarik. Hal ini karena Indonesia memiliki ratusan suku budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Pemerintah menargetkan mampu mengumpulkan devisa sebesar 20 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 2,8triliun. Target tersebut lebih besar 3 miliar dollar AS dibandingkan perolehan devisa dari pariwisata tahun lalu yakni 17 miliar dollar AS atau Rp 2,3 triliun. Besarnya potensi yang dimiliki industri pariwisata membuat pemerintah yakin bahwa jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang ke Indonesia akan terus bertambah. Berikutnya, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada 2019 mencapai 20 juta orang. Target tersebut lebih besar dibandingkan jumlah wisman yang datang pada tahun lalu, yaitu lebih dari 16 juta orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar

dibandingkan perolehan sebelumnya pada tahun 2013 yang hanya 8,8 juta orang. Di sisi lain pada 2018, sektor pariwisata Indonesia tercatat dengan pertumbuhan tertinggi peringkat ke-9 di dunia, versi The World Travel & Tourism Council (WTTC).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi peningkatan perekonomian nasional, melalui penciptaan ribuan lapangan pekerjaan, mengembangkan infrastruktur suatu negara dan menanamkan rasa pertukaran budaya antara wisatawan mancanegara dan domestik. Keuntungan terbesar pariwisata adalah masuknya devisa kedalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebagaimana yang tertulis dalam Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan sehingga menjadikan sektor ini sebagai pilar ekonomi Negara (Rahayu dan Sulisyawati, 2021: 252).

Perekonomian nasional tidak bisa bergantung pada sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa negara, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan mengalami krisis. Maka pariwisata dapat membantu meringankan kondisi industri yang lemah dan menghentikannya agar tidak berdampak besar pada ekonomi negara. Sektor pariwisata merupakan jaring pengaman bagi Negara-negara dan menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi negara-negara berkembang (Katja, 2020).

Menurut Octarica menyatakan bahwa dalam ilmu Hubungan Internasional, pariwisata dipelajari tidak hanya sebagai salah satu instrumen peningkatan ekonomi negara, namun juga sebagai salah satu instrumen diplomasi dan nation branding negara dalam konstelasi global. Suatu negara dapat menggunakan pariwisata sebagai sarana untuk meningkatkan devisa negara, menjalin perdamaian dunia, menawarkan pekerjaan bahkan dapat digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan potensi sumber daya alamnya ke dunia internasional. Maka dari itu, diperlukan sebuah strategi untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata yang melibatkan berbagai aktor negara hingga mampu berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional dan citra baik di mata internasional. Kebijakan pariwisata adalah elemen pengambilan keputusan yang bersifat politik (Rahayu dan Sulisyawati, 2021: 253).

Pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pariwisata menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Aspek politik dilihat dari bagaimana kekuasaan digunakan oleh organisasi publik dalam mengelola pariwisata. Instrumen utama yang digunakan Pemerintah melibatkan semua jenis organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, peran Pemerintah sangat penting karena pariwisata merupakan sektor yang membawa banyak manfaat baik dari segi ekonomi maupun politik bagi Negara.

Pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan pariwisata di era globalisasi telah memberikan pengaruh yang besar. Hal ini membuat beberapa negara yang menjadikan sektor ini sebagai salah satu fokus untuk meningkatkan perekonomian

negaranya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, Pariwisata telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia sangat penting. Sebagai salah satu sumber devisa Negara maupun kesempatan kerja. Di Indonesia, pariwisata menjadi sektor yang paling strategis dalam meningkatkan perekonomian maupun pembangunan. Sektor pariwisata di Indonesia menempati urutan ketiga sebagai penyumbang devisa Negara terbesar setelah sektor migas dan kelapa sawit. Peran dan kontribusi tersebut semakin mengukuhkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis dan memiliki potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.

Penelitian yang dapat dikembangkan yaitu *Project Ten New Bali's* merupakan pengembangan proyek ATSP II tahun 2016-2025. Proyek tersebut meliputi Danau Toba Sumatra Utara, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Pantai Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Gunung Bromo Jawa Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Selatan dan Pulau Morotai Maluku Utara.

Proyek tersebut diprogramkan oleh kementerian pariwisata selama masa jabatan Arif Yahya sebagai menteri pariwisata pada tahun 2016 pada periode ATSP II. Hal ini merupakan bagian dari rezim internasional dan Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara dan ASEAN ikut melakukan perubahan terkait kebijakan pariwisata. Kementerian pariwisata mengembangkan *Project*

*Ten New Bali's* sebagai salah satu strategi kebijakan pariwisata baru dalam memasukkan wilayah-wilayah baru di Nusantara sebagai tujuan wisata utama selain Bali.

Daerah-daerah tersebut dikembangkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dengan Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili di Madrid, Spanyol, 24 Januari 2019, pertemuan tersebut membahas tentang *Sustainable Tourism Development (STD)*, dan *Homestay* Desa Wisata yang tengah dikembangkan Kemenpar (Kompas, 26/1/2019). UNWTO adalah organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah diberi tanggung jawab untuk menangani masalah pariwisata dunia dengan fokus utama dalam bidang Pariwisata (Nasrun, 2021: 1-2).

UNWTO memiliki program *Sustainable Tourism Development* yang mana program tersebut diterapkannya di negara-negara anggota UNWTO, termasuk Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam UNWTO dimulai sejak tahun 1970 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1972 tentang Pengesahan Statues of The World Tourism Organization (Pengesahan "Statues of The World Tourism Organization (Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisata Sedunia). Sejak saat itu Indonesia aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh UNWTO serta berperan aktif dalam keanggotaan UNWTO (Nasrun, 2021: 1-2).

UNWTO berkomitmen untuk mempromosikan pariwisata sebagai instrumen dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diarahkan pada pengurangan kemiskinan, dan mendorong pembangunan

berkelanjutan. UNWTO mempromosikan kebijakan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan dengan mengembangkan instrumen, pendidikan dan pelatihan pariwisata, dan bekerja untuk menjadikan pariwisata sebagai alat yang efektif untuk pembangunan melalui proyek bantuan teknis di lebih dari 100 negara di sekitarnya Dunia. Saat ini, keanggotaan UNWTO mencakup 158 negara, 6 asosiasi anggota dan lebih dari 480 anggota afiliasi yang mewakili sektor swasta, pendidikan lembaga, asosiasi pariwisata dan otoritas pariwisata lokal Fang (2020: 2-3).

UNWTO memberikan kontribusi berupa dana yang akan digunakan untuk pembangunan lingkungan Pariwisata atau warisan sejarah yang sesuai dengan tujuan UNWTO yaitu meningkatkan dan membangun lingkungan Pariwisata yang merupakan salah satu kontributor dalam peningkatan ekonomi, toleransi dan perdamaian internasional, HAM (Hak Asasi Manusia) serta persamaan hak untuk semua kalangan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, agama serta bahasa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dipaparkan, di antaranya pertama, di dalam jurnal yang berjudul *Implikasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025 Dalam Pengembangan Project Ten New Bali's Indonesia* menyatakan bahwa ASEAN dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di kawasan Asia Tenggara telah menyepakati satu kerangka kebijakan ATSP (*ASEAN Tourism Strategic Plan*) selama dua periode, I dan II. Kebijakan tersebut berimplikasi pada pengambilan kebijakan terkait pariwisata di negara-negara

anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi ATSP II tahun 2016-2025 terhadap kebijakan pariwisata Indonesia.

ATSP II tahun 2016-2025 merupakan satu bentuk rezim pariwisata di Asia Tenggara yang mempengaruhi perumusan strategi pariwisata Indonesia *Project Ten New Bali's*. Pengembangan *Project Ten New Bali's* meliputi Danau Toba Sumatra Utara, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Pantai Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Gunung Bromo Jawa Timur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Selatan dan Pulau Morotai Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan konsep rezim internasional dan *sustainable tourism*, untuk menjelaskan keterkaitan strategi pariwisata *Project Ten New Bali's* Indonesia sebagai implikasi pengaruh rezim pariwisata di kawasan Asia Tenggara yang mendorong Indonesia merumuskan strategi pariwisata baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional (Rahayu dan Sulisyawati, 2021: 249-250).

Kedua, dalam penelitian yang berjudul *Peran United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Terhadap Perkembangan Pariwisata Di Indonesia* bertujuan untuk mengetahui peran UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Pangandaran dengan konsep *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan) serta untuk mengetahui dampak peran UNWTO dalam pengembangan pariwisata di Pangandaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran yang dilakukan oleh UNWTO dalam pengembangan pariwisata di Indonesia,

khususnya Pangandaran dengan memberikan peluang bagi masyarakat, lembaga swasta, pemerintah serta UNWTO dalam pengembangan pariwisata berkonsep *Sustainable Tourism Development* yang memberikan dampak dari peran UNWTO bagi sektor pariwisata di Pangandaran (Nasrun, 2021).

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul Pengembangan PAriwisata Matirim Di Wilayah Perbatasan: *Studi Sustainable Tourism* Di Natuna dan Bintan menyatakan bahwa Pembangunan pariwisata yang diusung UNWTO berfokus kepada pariwisata yang berorientasi keseimbangan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang mana sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan penting dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata bahari di perbatasan di wilayah Kepulauan Riau sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutama di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan (Kartika dkk, 2021: 48).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan membahas tentang **“Peranan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) Dalam Membantu Pengembangan *Project Ten New Bali’s* Di Indonesia Tahun 2019 - 2022”**

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, yaitu antara lain:

1. Organisasi Internasional
2. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional
3. Diplomasi dan Negosiasi

Pertama, definisi umum Organisasi Internasional (OI) adalah suatu organisasi formal yang keanggotaannya terdiri dari tiga atau lebih Negara untuk mencapai tujuan yang spesifik (Gutner, 2017: 19). Menurut Reinalda dan Gutner bahwa terdapat dua bentuk organisasi internasional, yaitu: *inter-governmental organization*, dikenal dengan singkatan IGO, dan *International Non Governmental Organization*, yang selanjutnya dikenal dengan singkatan INGO (Yolanda dkk, 2020: 5). Namun, ada juga pendapat yang mengkategorisasi organisasi internasional adalah hanya merujuk pada organisasi yang dibuat Negara dan tidak memasukkan kategori INCGO sebagai bagian dari OI (Yolanda dkk, 2020: 5). Organisasi Internasional berbeda dengan INGO karena OI mempunyai pola minimum yaitu (a) dibentuk oleh Negara berdaulat dengan representasi perwakilan Negara di dalamnya untuk mengupayakan kerja sama internasional; (b) mempunyai misi berbeda dan status permanen; (c) mempunyai presiden atau pemimpin teridentifikasi; dan (d) memiliki staf di suatu sekretariat. Karena OI sebagai aktor internasional, maka penting untuk melihat kualitas pemimpinnya. Kualitas pemimpin dalam mengemban misi atau tujuan tertentu dilihat dari kapasitas organisasi dan personal (termasuk karisma personal) serta visi. Pemimpin suatu OI setidaknya menjalankan tiga fungsi dasar yaitu sebagai diplomat, politisi, dan pimpinan birokrat (Chong dan Weller 2015: 3-12).

Dari penjelasan Organisasi Internasional tersebut dapat disimpulkan bahwa Organisasi Internasional merupakan suatu organisasi formal yang beranggotakan lebih dari dua Negara untuk mencapai tujuan suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Perlu diketahui, dalam sebuah kerja sama Organisasi

Internasional diperlukan setiap aktor harus memiliki kualitas (termasuk karisma personalnya) agar dalam menjalankan negosiasi serta merealisasikan suatu program dapat dijalankan dengan baik.

Kedua, pemahaman Ilmu Hubungan Internasional pada masa pasca Perang Dingin, Joshua Glodstein mendefinisikan bahwa Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu politik, tepatnya politik internasional yang mempelajari tentang keputusan-keputusan pemerintah menyangkut tindakan mereka terhadap pemerintah lainnya. HI (Hubungan Internasional) juga merupakan studi tentang politik internasional, yakni hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, dan seterusnya (Hadiwinata, 2017: 13).

Menurut Karen Mingst mendefinisikan Ilmu Hubungan Internasional dalam perspektif yang tidak lagi berpusat pada Negara yaitu interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional termasuk di dalamnya adalah Negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah local, serta individu. HI adalah studi tentang perilaku aktor-aktor tersebut ketika mereka berpartisipasi baik secara individu maupun bersama-sama dalam proses politik internasional (Hadiwinata, 2017: 13).

Dari definisi tersebut sangat dipengaruhi oleh politik internasional pasca Perang Dingin yang ditandai dengan kehadiran aktor-aktor non-negara yang ikut mempengaruhi arah perkembangan politik internasional di mana kelompok-

kelompok seperti non-pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia membantu promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks inilah Mingst berupaya mengurangi nuansa *state-centric model* dalam studi HI. Dari berbagai definisi studi HI tersebut tampak bahwa studi HI sebagai disiplin ilmu menunjukkan perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Ketiga, untuk memahami diplomasi negosiasi, pertama kali harus memahami apa itu diplomasi. Menurut Sharp bahwa diplomasi sebagai lembaga penting bagi pelaksanaan hubungan antar Negara, seperti yang diketahui. Selain itu, diplomasi telah terbukti menjadi institusi tangguh, karena merupakan salah satu dari sedikit lembaga internasional yang berhasil menghadapi tantangan kedaulatan rakyat dan nasionalisme abad kesembilanbelas (Carlsnaes dkk, 2021: 2). Berikutnya, menurut Hamilton dan Langhorne bahwa diplomasi sebagai tindakan hubungan dalam antara entitas-entitas politik, para pelakunya dan agen-agen yang diberi wewenang (Carlsnaes dkk, 2021: 4).

Negosiasi dapat dianggap sebagai salah satu cara pengambilan keputusan bersama yang dapat dikenali, harus dibedakan dari koalisi, di mana pilihan dibuat dengan melakukan *voting*, dan adjudikasi, di mana pilihan dibuat secara hierarkis oleh seorang hakim yang mengumpulkan nilai-nilai dan kepentingan yang bertentangan menjadi keputusan tunggal (Carlsnaes dkk, 2021: 28-29).

Sehubungan dengan penjelasan diplomasi negosiasi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan hubungan dalam antara entitas-entitas politik, para pelakunya dan agen-agen yang diberi wewenang dalam pengambilan

keputusan bersama yang dapat dikenali, di mana pilihan dibuat dengan melakukan *voting* dan ajudikasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari dua rumusan, di antaranya rumusan masalah mayor dan minor. Adapun kedua rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Adapun rumusan masalah Mayor dalam Penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam Membantu pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022?”

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya UNWTO dalam membantu pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apa saja hambatan yang dialami Pemerintah dalam pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022?
3. Bagaimana perkembangan sektor pariwisata melalui *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian dari tahun 2019-2022. Dikarenakan pada tahun 2019 kemenpar melakukan pertemuan

bersama dengan jendral UNWTO di Madrid, Spanyol 24 Januari 2019, untuk membahas *Sustainable Tourism Development*. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap peranan UNWTO dalam membantu pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Peranan UNWTO dalam mendukung sektor Pariwisata Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya UNWTO dalam membantu pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pemerintah dalam pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui perkembangan sektor pariwisata melalui *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan mengenai peranan UNWTO dalam mendukung sektor Pariwisata di Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Untuk Peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 (Strata Satu) pada Progam Studi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. dan juga sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti, serta menambah tingkat analisis peneliti.

#### 2. Untuk Akademik

Penelitian ini berguna untuk mahasiswa UNIKOM secara umum dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terutama sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

#### 3. Untuk Masyarakat

Penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan hadir sebagai pengetahuan untuk mengetahui bagaimana Peranan UNWTO dalam membantu pengembangan *Project Ten New Bali's* di Indonesia tahun 2019-2022.